

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Konsep pendidikan kewarganegaraan (PKn) yang diadopsi suatu negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Davies (2001) menegaskan *the nature of citizenship education a country adopts is greatly influenced by the political context and ideology of the state*. Walaupun setiap negara memiliki konsep pendidikan kewarganegaraan yang sangat dipengaruhi oleh konteks politik dan ideologi masing-masing negara, tetapi pendidikan kewarganegaraan memiliki posisi dan peran yang strategis bagi sebuah negara. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah Amerika berupaya mengembangkan kewarganegaraan partisipatif (*participatory citizenship*) yaitu cenderung untuk berpikir kritis tentang berbagai masalah sosial dan *personally responsible* yaitu membentuk warga negara yang bertanggung jawab secara pribadi yang sesuai dengan undang-undang (Lin, 2013). Negara Australia berpandangan pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk pemuda Australia menjadi “warga negara yang aktif dan terinformasi” sehingga mereka dapat “memahami sistem pemerintahan Australia” serta memiliki keterampilan untuk “berpartisipasi dalam kehidupan sipil Australia” (Ghazarian, 2020). Negara Zimbabwe memandang pendidikan kewarganegaraan sebagai dasar terciptanya warga negara yang baik dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab di masyarakat dan bangsa, dan dapat membantu dalam memberikan solusi terkait dengan masalah politik, ekonomi, sosial dan ekologi yang dihadapi negara (Sigauke, 2012). Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga dapat memiliki posisi dan berperan sebagai alat untuk menjembatani perpecahan dalam masyarakat, seperti pada negara Irlandia Utara (McEvoy, 2007), Republik Irlandia (Murphy, 2006), Argentina dan Kosta Rika (Suarez, 2008). Berdasarkan beberapa pandangan di atas, dapat dinyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu akan dipengaruhi oleh konteks politik dan ideologi suatu negara, serta pendidikan kewarganegaraan menempati posisi strategis dalam mewujudkan warga negara yang partisipatif dan bertanggung jawab demi mewujudkan kedamaian bagi negara bersangkutan.

Posisi dan peran pendidikan kewarganegaraan (PKn) yang begitu penting juga dirasakan oleh negara Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah dalam rangka memberikan pemahaman mengenai Pancasila, UUD 1945, politik, hukum, nilai moral, *local wisdom*, NKRI, dan kebhinekaan dalam berkebudayaan serta implementasinya dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Santoso, 2015; Dirjendikti, 2020). PKn dalam upaya membangun sosok warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air telah mengantarkan PKn sebagai *conditio sine qua non* pada pendidikan nasional di Indonesia. PKn juga memiliki hakikat sebagai: (1) PKn selalu muncul atau selalu diajarkan disetiap jenjang pendidikan, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, (2) PKn merupakan bidang kajian ilmiah bersifat multidimensii yang mengintegrasikan peran pendidikan politik; pendidikan hukum dan norma; pendidikan nilai moral, dan budi pekerti; pendidikan ideology; dan pendidikan social secara umum, (3) PKn juga merupakan program aksi sosio-cultural kemsyarakatan sebagai pendidikan partisipasi aktif sosok warga negara pada kelangsungan hidupnya (Winataputra, 2001; Sukadi, 2010). Hal ini membuktikan betapa pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia, karena mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini mencetak generasi-generasi muda Hindu yang siap terjun sebagai warga negara yang partisipatif dan memiliki rasa kebangsaan serta cinta tanah air.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki visi dan misi yang sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Secara filosofis Pendidikan Kewarganegaraan mengandung visi *holistik-eklektis* yaitu mengintegrasikan pemikiran *perennialisme*, *esensialisme*, *progressifisme*, serta *sosiorekonstruksioniisme* pada bingkai ke-Indonesiaan (Winataputra, 2001, 2015; Kemendikbud, 2013). Sedangkan berdasarkan sosiopolitik dan kultural PKn mengemban visi pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menumbuhkembangkan *civic intelligence* sebagai prasyarat dalam pembangunan demokrasi secara luas, yang berupaya mewujudkan *civic culture* sebagai faktor penentu tumbuh dan berkembangnya negara demokrasi (Winataputra, 2016). Hakikat dan visi PKn telah mengantarkan kita pada misinya yang memiliki sifat

multidimensiional yaitu: (1) mengembangkan bakat anak didik secara progresif-berkelanjutan (misi psikopedagogis), (2) memberikan kecakapan kepada anak didik untuk melangsungkan kehidupannya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (misi psikososial), dan (3) membangun *culture* dan keadaban kewarganegaraan sebagai faktor penentu kehidupan yang demokratis (misi sosiokultural). (4) khusus pada jenjang pendidikan tinggi, selain ketiga misi tersebut harus ditambahkan misi penelitian dan/atau pengembangan yang dirancang untuk mewujudkan PKn sebagai *integrated knowledge system* atau juga disebut *synthetic discipline* baik secara perorangan dan/atau kelompok, serta ditempuh dengan jenjang S2 dan S3 PKn (Cogan,1999; Winataputra,2001;2015; Hartonian, 1992; Somantri, 1993). Sehingga visi Pendidikan Kewarganegaraan dapat dinyatakan adalah dalam rangka mencerdaskan setiap warga negara, melalui misi pengembangan bakat dalam diri, penanaman kecakapan agar dikelak hari siap terjun kemasyarakat, menciptakan budaya kewarganegaraan yang demokratis, dan menyarankan untuk melakukan penelitian terkait pengembangan diri agar mampu memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Jika hakikat, visi, dan misi PKn dijadikan landasan maka tujuan PKn niscaya dapat diwujudkan yaitu menjadikan sosok warga negara berkepribadian baik dan berpikiran cerdas (*to be smart and good citizenship*) (Cogan, 1997; Wahab dan Sapriya, 2011). Konsep warga negara yang baik itu memiliki tafsiran atau sudut pandang yang berbeda dan tergantung dari sudut pandang penguasa. Pernyataan ini didukung oleh Siagauke (2012) yang menyatakan *a good citizen could have meant someone who unquestioningly accepts and conforms to values, norms and beliefs as defined by authority*. Sunarso (2012) mencontohkan bahwa: (a) ketika Orde lama konsep warga negara yang berkepribadian baik itu adalah warga negara berkepribadian “*revolusioner*”, anti *imperialism kolonialisme*, *kolonialisme*, dan *neo kolonialisme*; (b) ketika Orde Baru warga negara berkepribadian baik dicirikan sebagai warga negara berjiwa Pancasila, manusia pembangunan, dan lain-lain; (c) sedangkan pada saat masa reformasi warga negara yang berkepribadian baik adalah sosok yang aktif dalam sistem pemerintahan negara itu sendiri. PKn terbukti efektif dalam membentuk

kemampuan politik peserta didik (*young citizens*) berjiwa demokratis serta bertanggung jawab (Gainous, 2012). Oleh sebab itu, peserta didik (*young citizens*) penting untuk dibelajarkan mata kuliah PKn agar mampu berkehidupan demokratis (melalui *learning about democracy* dan *learning for democracy*).

Pentingnya hakikat, visi, dan misi yang diusung Pendidikan Kewarganegaraan bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia, ternyata tidak berbanding lurus dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat. Beberapa permasalahan kerap terjadi di masyarakat, yang seakan-akan menandakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan tidak berperan sebagaimana yang diharapkan. Pertama, yaitu maraknya terjadi aksi kenakalan generasi muda di Provinsi Bali. Kenakalan generasi muda kerap terjadi di Provinsi Bali, tidak hanya berkaitan dengan tindakan pidana tetapi juga berkaitan dengan keyakinan agama Hindu. Beberapa contohnya: 1) pada tanggal 15 Mei 2021, jajaran Polres Jembrana mengungkapkan kasus perusakan daksina linggih yang terjadi di beberapa tempat persembahyangan (*merajan*) di wilayah kelurahan Lelateng, Banjar Tengah dan Baler Bale Agung, yang dilakukan oleh enam orang remaja (Mahendra, 2021); 2) berdasarkan hasil penelitian Santoso (2000) terkait dengan Kenakalan Remaja di Jawa Barat dan Bali diketahui bahwa remaja di Bali senang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi (diperkotaan 18,4% dan di pedesaan 22,4%), bolos sekolah (diperkotaan 30,1% dan di pedesaan 37,1%), pergi dari rumah tanpa izin orang tua (diperkotaan 58,4% dan di pedesaan 52,7%), kenakalan dengan suka mencoret-coret fasilitas umum (diperkotaan 31,7% dan di pedesaan 19,6%), kenakalan remaja yang mengarah kriminalitas, seperti pemerasan dan pencurian (diperkotaan 8,9% dan di pedesaan 17,7%); dan 3) mahasiswa di Bali yang melakukan demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja pada tanggal 8 Oktober 2020 berlangsung ricuh dan merusak fasilitas umum (Rosidin, 2020). Kasus kenakalan generasi muda ini telah memberikan gambaran bahwa peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mendidik generasi muda menjadi sosok warga negara berkepribadian baik dan berpikiran cerdas (*to be smart and good citizenship*) belum dinilai maksimal.

Permasalahan kedua, yaitu proses belajar mengajar PKn yang umum berlangsung di jenjang pendidikan tinggi belum secara maksimal memadukan

potensi dan dimensi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia (seperti emosional, intelektual, sosial, personal, spiritual, dan moral). Santoso (2015: 86) menegaskan bahwa pengajaran PKn masih mementingkan aspek kognitif daripada aspek afektif dan psikomotorik, sehingga pembelajaran terkesan monoton dan tidak inovatif. Hal ini bisa dibuktikan dari perangkat pembelajaran (Silabus dan RPS) yang digunakan oleh dosen Pendidikan Kewarganegaraan lebih banyak muatan materi yang mengarah kepada peningkatan kognitif saja. Pandangan ini diperkuat dengan melihat substansi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di kurikulum Pendidikan Tinggi sesuai dengan Keputusan Dirjen Dikti nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi, yang memuat sembilan substansi pokok yang lebih mengarah kepada peningkatan kognitif. Widiatmaka (2016) juga menyatakan selama ia memberikan perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan, sebagian besar mahasiswanya berpandangan jika pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan itu sebagai mata kuliah yang membosankan dan tidak penting, karena hanya menekankan teori daripada aplikatifnya. Padahal Pendidikan Kewarganegaraan itu merupakan mata kuliah dalam rangka mempersiapkan generasi muda Hindu untuk memiliki kesiapan menjadi sosok warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizen*), oleh karenanya kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang Pendidikan Tinggi yaitu tidak hanya memiliki kognitif (*civic knowledge*) yang tinggi saja, tetapi juga memiliki *civic skills* dan *civic disposition* yang mumpuni.

Permasalahan yang ketiga, yaitu penguasaan kompetensi dosen Pendidikan Kewarganegaraan yang belum maksimal. Selain menekankan kompetensi yang wajib dimiliki oleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan, seorang dosen pun juga harus memiliki kompetensi sebelum ia memberikan perkuliahan. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 69 ayat 2 dinyatakan bahwa seorang dosen itu wajib memiliki empat kompetensi dalam dirinya, seperti: 1) Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan dosen dalam mengelola proses belajar dan mengajar untuk menjadikan suasana kelas yang kondusif; 2) Kompetensi profesional, yaitu kemampuan dosen dalam menguasai

materi pembelajaran sebelum diajarkan kepada mahasiswa; 3) Kompetensi sosial, yaitu kemampuan dosen dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar, mahasiswa, dan komponen masyarakat lainnya; 4) Kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan diri seorang dosen untuk menjadi sosok yang religius, bertanggung jawab, berintegritas, jujur dan mampu menjadi teladan bagi mahasiswa lainnya. Berdasarkan empat kompetensi tersebut, sejauh pengamatan dilapangan bahwa dosen Pendidikan Kewarganegaraan belum secara maksimal menguasai kompetensi pedagogik dan kompetensi professional. Hal ini dikarenakan yang menjadi dosen Pendidikan Kewarganegaraan itu dimungkinkan adalah dosen yang tidak berasal dari bidang ilmu Pendidikan Kewarganegaraan sesuai dengan Keputusan Dirjen Dikti nomor 84/E/KPT/2020. Hal ini mengindikasikan bahwa seorang dosen yang tidak memiliki dasar mengajar dan mengelola kelas diperbolehkan mengajar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga yang terjadi adalah mahasiswa akan merasa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pembelajaran yang membosankan. Selain itu pula kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian seorang dosen mendapat sorotan tajam dimasyarakat. Beberapa peristiwa yang pernah terjadi di Bali yaitu 1) terjadinya pelecehan yang dilakukan oleh oknum dosen kepada mahasiswinya ketika hendak melakukan bimbingan skripsi (Arri, 2020); 2) pernyataan Desak Made Darmawati yang menimbulkan kegaduhan dimasyarakat terutamanya masyarakat Bali yang beragama Hindu, hal ini dikarenakan pernyataannya itu telah menyinggung keyakinan tentang Tuhan dalam agama Hindu (Suadnyana, 2021).

Dosen dituntut menjadi sosok yang profesional dalam bidangnya. Hal ini dikarenakan pendidik menjadi faktor penting dalam proses pembelajaran (Barghava, 2011). Pada abad ke-21 ini seorang pendidik yang profesional itu memiliki keterampilan dalam mengajar, memiliki potensi dalam membangun serta mengembangkan hubungan diantara pendidik dan institusi mengajar dengan komunitas masyarakat yang lebih luas, dan pendidik mampu menjadi agen perubahan di institusi mengajarnya (Widodo, 2020). Pembelajaran yang diajarkan oleh pendidik dikatakan berhasil jika telah melibatkan anak didiknya ketika pembelajaran berlangsung. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Cooper &

Tenbrink (2011) yaitu, *effective teachers know that one of their primary tasks is to involve the student in the learning process*. Sehingga pendidik dituntut tidak hanya pandai mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak didik, tetapi yang terpenting adalah bagaimana pendidik itu mampu mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki peserta didiknya serta selalu memberikan penanaman nilai sikap dan budi pekerti yang luhur pada diri anak didik.

Permasalahan keempat, yaitu media pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang digunakan oleh dosen belum menyesuaikan dengan karakteristik generasi digital native. Media pembelajaran yang digunakan oleh dosen Pendidikan Kewarganegaraan selama ini masih bersifat konvensional seperti hanya menggunakan buku cetak ataupun modul cetak. Sedangkan pembelajaran yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang tergolong generasi digital native, perlu kiranya media pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan disesuaikan dengan karakteristik mahasiswa yaitu berbasis digital. Mayoritas dosen saat ini lahir sebelum tahun 1980 yang dikategorikan *digital immigrant generation* (DIG) (Prensky, 2001). Pendidik yang tergolong DIG memiliki perbedaan dengan anak didik DNG. Anak didik DNG lahir pada budaya yang telah dipenetrasi oleh teknologi digital (Kivunja, 2014) sedangkan pendidik DIG lahir pada saat teknologi masih sangat terbatas (Prensky, 2001).

Anak didik yang sedang belajar saat ini adalah generasi yang lahir setelah tahun 1980 dan dikategorikan sebagai *digital native generation* (DNG) (Prensky, 2001), milenial (Lancaster & Stillman, 2002), atau *the net generation* (Sandars & Morrison, 2007). Anak didik yang dikategorikan sebagai DNG merupakan generasi yang sehari-harinya tidak dapat dilepaskan dengan teknologi digital. Ali & Lilik (2016) mengungkapkan generasi ini memiliki ciri-ciri seperti: (1) *Confidence*, memiliki kepercayaan diri tinggi dan berani memberikan pendapat di depan publik; (2) *creative*, memiliki pemikiran *out of the box*, kaya akan inovasi, dan mampu menyampaikan inovasi tersebut dengan tepat; dan (3) *connected*, memiliki kepandaian bersosialisasi dalam komunitasnya dan aktif di dunia maya. Mayoritas pendidik saat ini lahir sebelum tahun 1980 yang dikategorikan *digital immigrant generation* (DIG) (Prensky, 2001). DNG memiliki cara berpikir yang berbeda, kebiasaan belajar dan bahasa daripada DIG. Anak didik DNG memiliki

kebiasaan belajar dengan cara yang menyenangkan dan fleksibel (seperti belajar sambil mendengarkan musik, menonton televisi, dan juga sambil mengobrol dengan teman), akan tetapi pendidik DIG berpandangan belajar dengan cara seperti itu tidak akan berhasil karena pendidik DIG tidak bisa belajar seperti itu (Prensky, 2001). Pola berpikir dan kebiasaan belajar yang berbeda, telah menunjukkan perbedaan budaya antara dua generasi dalam proses pembelajaran yang mereka alami. Menjadi pendidik profesional abad-21 tentunya tidak bisa memaksakan model pembelajaran, metode pembelajaran, serta bahan ajar yang digunakan sesuai dengan kehendak dari pendidik, akan tetapi harus disesuaikan dengan karakteristik dari anak didik mereka.

Permasalahan kelima, yaitu bahan ajar Pendidikan Kewarganegaraan yang miskin nilai-nilai budaya spiritual masyarakat. Bahan ajar Pendidikan Kewarganegaraan secara umum lebih mengajarkan kepada mahasiswa terkait hubungan warga negara dengan negara dengan pola sekuler. Sehingga urusan negara dengan urusan agama dianggap terpisah, hal ini mengindikasikan bahwa bahan ajar Pendidikan Kewarganegaraan itu miskin akan nilai yang bersumber pada *local wisdom, cultural, spiritual-relious* masyarakat. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Sukadi (2010) yang menyatakan praktek pembelajaran di Bali diwarnai oleh hal-hal berikut: (1) nilai sosial budaya beserta nilai moral sangat kurang untuk disinergikan dalam dunia pendidikan khususnya pembelajaran PKn; (2) Rencana pembelajaran dan silabus PKn (yang memuat metode, materi, media, evaluasi, dan referensi) kurang mensinergikan nilai spiritual-religiuis; dan (3) proses belajar mengajar di kelas terkesan hanya menekankan aktivitas fisik dan kognitif tingkat rendah serta sedikit sentuhan aktivitas mental yang bersumber moralitas, spiriitual, dan religious; (4) bahan ajar PKn lebih mengajarkan kepada peserta didik terkait hubungan warga negara dengan negara (berpola sekuler) sehingga urusan negara dengan urusan agama dianggap terpisah, hal ini menjelaskan bahwa bahan ajar PKn miskin akan nilai yang bersumber pada *local wisdom, cultural, spiritual-relious* masyarakat. (5) Inovasi pembelajaran yang telah digunakan selama proses pembelajaran PKn tidak terjamin keberlanjutannya, hal ini disebabkan oleh pendidik merasa asing dengan profesinya akibat kurang berbasis *local wisdom* masyarakat setempat.

Mahasiswa dituntut menjadi sosok warga negara yang berkompeten dan dapat memadukan seluruh kompetensi kewarganegaraan yang dimilikinya. Nusarastraya (2013: 444) menyatakan di abad ke-21 ini, jika seseorang ingin bertahan maka *critical thinking and problem solving* merupakan hal yang wajib dimiliki setiap orang. Pembelajaran PKn yang berlangsung di Bali memperlihatkan dominasi dan hegemoni praktek pendidikan nasional yang terkesan mengesampingkan nilai holistik-humanis-religious, akibat dari dikuasainya pendidikan oleh ideologi *pasar kapitalisme* yang terkesan mengarah kepada cara berpikir *rasionalisme-empirisme* atau *rasionalis-materialis*, akibatnya jiwa pendidikan yang dilandasi nilai-nilai moral dan spiritual menunjukkan gejala sekularisasi. Hal ini menunjukkan dunia pendidikan nasional kita seperti halnya dunia dari negara sekuler yang terkesan memisahkan ideology agama dengan ideology ilmu pengetahuan (Sukadi, 2010; Kaelan, 2003). Mengatasi permasalahan tersebut diperlukan strategi dalam mengembangkan praktik pembelajaran PKn di jenjang pendidikan tinggi. Perubahan paradigma belajar mengajar dan perkembangan teknologi telah menyebabkan peran yang harus dijalankan pendidik selama proses pembelajaran diharapkan memahami serta mengetahui dengan jelas perkembangan anak didik mereka, sehingga pendidik dapat menggunakan pendekatan yang inovatif dalam proses pembelajaran (Firman, 2009). Oleh karena itu, pembelajaran PKn selain memanfaatkan teknologi juga memerlukan pemikiran yang *holistik-humanis-religious* dan terpadu.

Berlandaskan atas pemikiran dan kondisi riil yang terjadi dilapangan telah memberikan inspirasi kepada peneliti untuk melaksanakan studi etnografi pada jenjang pendidikan tinggi di Bali. Peneliti berpandangan perlu dilakukannya rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan tinggi dalam rangka mengembalikan marwah Pendidikan Kewarganegaraan menjadi mata kuliah yang penting dan bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia dalam menghadirkan warga negara yang berkepribadian baik dan berpikiran cerdas di tengah-tengah masyarakat. Untuk itulah secara spesifik peneliti merumuskan judul penelitian yaitu “Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Budaya Spiritual Hindu Bagi Generasi Muda Hindu Dalam Rangka

Pembinaan *Dharma Agama* dan *Dharma Negara* (studi etnografi pada jenjang pendidikan tinggi di Bali)”.

Apabila ditinjau ulang, unsur keterbaruan (*novelty*) dalam penelitian ini yang menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada beberapa aspek yaitu pertama, penelitian ini akan merekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah yang berperan dalam mempersiapkan generasi muda Hindu menjadi warga negara yang berkepribadian baik dan berpikiran cerdas, yaitu salah satunya diwujudkan dengan mampu mengamalkan kewajiban yang melekat pada dirinya, baik sebagai seorang warga negara kepada negaranya (*dharma negara*) maupun kewajibannya seorang umat kepada agama yang dianutnya (*dharma agama*). Mempersiapkan mahasiswa sebagai sosok warga negara yang berkepribadian baik (beriman, bermartabat, bertakwa, bermoral) dan berpikiran cerdas intelektual secara pribadi ataupun sosial (religius, holistik, dan humanis) sangat diharapkan bagi bangsa dan negara Indonesia.

Keterbaruan (*novelty*) kedua, yaitu peneliti mencoba mengintegrasikan nilai-nilai budaya spiritual masyarakat Bali yang bersumber dari konsep ajaran agama Hindu ke dalam materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan khususnya pada pokok bahasan “Hak dan Kewajiban Warga Negara”. Nilai budaya spiritual Hindu diterapkan pada pembelajaran PKn karena peneliti berpandangan bahwa agama, kebudayaan, dan pendidikan yang merupakan bagian dari peradaban manusia adalah bersifat satu kesatuan (kontinum). Pandangan ini menganut adagium yang disampaikan oleh Albert Einstein yaitu “*science without religion is lame, religion without science is blind*” (Jammer, 1999). Begitu juga diperkuat oleh pandangan Giroux (1981) dan Pai (1990) yang menyatakan terdapat kaitan antara pendidikan dengan budaya masyarakatnya, selain itu pendidikan juga dipengaruhi oleh *society’s prevailing worldview and values*”. Subagia (2008) dan Sukadi (2010) juga memberikan penguatan bahwa dalam mencapai tujuan pendidikan khususnya PKn, sebagian besar masyarakat meyakini bahwa pendidikan berkaitan erat dengan budaya spiritual yang bersumber dari nilai agama.

Keterbaruan (*novelty*) ketiga, yaitu penelitian ini menghasilkan produk bahan ajar berupa modul digital dengan judul “Kewajiban Warga Negara Generasi Digital Native (pembinaan *dharma agama* dan *dharma negara*)”. Modul digital ini menjadi sebuah produk bahan ajar yang dipandang sesuai dengan karakteristik dari mahasiswa yang tergolong generasi digital native. Modul digital ini sebagai produk bahan ajar yang dapat mahasiswa baca kapan dan dimanapun melalui *smartphone* mereka masing-masing. Selain modul digital dilengkapi dengan materi, modul digital juga telah dilengkapi dengan soal-soal (soal objektif, soal diskusi, dan soal pengayaan) yang tidak hanya berupaya meningkatkan kemampuan kognitif (*civic knowledge*) mahasiswa saja, tetapi juga berupaya menanamkan *civic skills* dan *civic disposition* pada diri mahasiswa. Soal Objektif itu berupaya menguji daya nalar dan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disediakan (*civic knowledge*). Soal diskusi yang berisikan video tentang cerita rakyat Bali (*satua*) sebagai salah satu upaya dalam menanamkan *civic disposition* kepada mahasiswa sekaligus sebagai perwujudan upaya pelestarian budaya bali. Soal Pengayaan itu sebagai sebuah soal yang berisikan penugasan kepada mahasiswa dalam rangka mengasah *civic knowledge*, *civic skills* dan *civic disposition* mahasiswa dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat disekitarnya, sebagai perwujudan dari pengamalan kewajibannya sebagai warga negara.

1.2 Identifikasi Masalah

Latar belakang penelitian telah mengantarkan peneliti untuk dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul dan dihadapi di dalam memanifestasikan hakikat, visi, misi, beserta tujuan PKn, utamanya pada proses belajar mengajar PKn yang terjadi pada jenjang pendidikan tinggi, yaitu:

1.2.1 Maraknya terjadi aksi kenakalan remaja (generasi muda) di Provinsi Bali

Kenakalan yang dilakukan oleh generasi muda kerap terjadi di Provinsi Bali, tidak hanya berkaitan dengan tindakan pidana tetapi juga berkaitan dengan keyakinan agama Hindu. Beberapa contohnya: 1) pada tanggal 15 mei 2021, jajaran polres Jembrana mengungkapkan kasus perusakan daksina linggih yang terjadi di beberapa tempat persembahyangan (*merajan*) di wilayah kelurahan Lelateng,

Banjar Tengah dan Baler Bale Agung, yang dilakukan oleh enam orang remaja (Mahendra, 2021); 2) berdasarkan hasil penelitian Santoso (2000) terkait dengan Kenakalan Remaja di Jawa Barat dan Bali diketahui bahwa remaja di Bali senang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi (diperkotaan 18,4% dan di pedesaan 22,4%), bolos sekolah (diperkotaan 30,1% dan di pedesaan 37,1%), pergi dari rumah tanpa izin orang tua (diperkotaan 58,4% dan di pedesaan 52,7%), kenakalan dengan suka mencoret-coret fasilitas umum (diperkotaan 31,7% dan di pedesaan 19,6%), kenakalan remaja yang mengarah kriminalitas, seperti pemerasan dan pencurian (diperkotaan 8,9% dan di pedesaan 17,7%); 3) mahasiswa di Bali yang melakukan demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja pada tanggal 8 Oktober 2020 berlangsung ricuh dan merusak fasilitas umum (Rosidin, 2020).

1.2.2 Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan lebih dominan menekankan aspek kognitif.

Berdasarkan pengamatan dilapangan, bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan lebih ditekankan pada peningkatan aspek kognitif diri mahasiswa. Hal ini bisa dilihat dari perangkat pembelajaran (Silabus dan RPS) yang digunakan oleh dosen Pendidikan Kewarganegaraan lebih banyak muatan materi yang mengarah kepada peningkatan kognitif saja. Pandangan ini diperkuat dengan melihat substansi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di kurikulum Pendidikan Tinggi sesuai dengan Keputusan Dirjen Dikti nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi, yang memuat sembilan substansi pokok yang lebih mengarah kepada peningkatan kognitif. Widiatmaka (2016) juga menyatakan selama ia memberikan perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan, sebagian besar mahasiswanya berpandangan jika pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan itu sebagai mata kuliah yang membosankan dan tidak penting, karena hanya menekankan teori daripada aplikatifnya. Padahal Pendidikan Kewarganegaraan itu merupakan mata kuliah dalam rangka mempersiapkan generasi muda Hindu untuk memiliki kesiapan menjadi sosok warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizen*), oleh karenanya kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang Pendidikan Tinggi yaitu

tidak hanya memiliki kognitif (*civic knowledge*) yang tinggi saja, tetapi juga memiliki *civic skills* dan *civic disposition* yang mumpuni.

1.2.3 Penguasaan kompetensi dosen Pendidikan Kewarganegaraan yang belum maksimal.

Selain menekankan kompetensi yang wajib dimiliki oleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan, seorang dosen pun juga harus memiliki kompetensi sebelum ia memberikan perkuliahan. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 69 ayat 2 dinyatakan bahwa seorang dosen itu wajib memiliki empat kompetensi dalam dirinya, seperti: 1) Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan dosen dalam mengelola proses belajar dan mengajar untuk menjadikan suasana kelas yang kondusif; 2) Kompetensi profesional, yaitu kemampuan dosen dalam menguasai materi pembelajaran sebelum diajarkan kepada mahasiswa; 3) Kompetensi sosial, yaitu kemampuan dosen dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar, mahasiswa, dan komponen masyarakat lainnya; 4) Kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan diri seorang dosen untuk menjadi sosok yang religius, bertanggung jawab, berintegritas, jujur dan mampu menjadi teladan bagi mahasiswa lainnya. Berdasarkan empat kompetensi tersebut, sejauh pengamatan dilapangan bahwa dosen Pendidikan Kewarganegaraan belum secara maksimal menguasai kompetensi pedagogik dan kompetensi professional. Hal ini dikarenakan yang menjadi dosen Pendidikan Kewarganegaraan itu dimungkinkan adalah dosen yang tidak berasal dari bidang ilmu Pendidikan Kewarganegaraan sesuai dengan Keputusan Dirjen Dikti nomor 84/E/KPT/2020. Hal ini mengindikasikan bahwa seorang dosen yang tidak memiliki dasar mengajar dan mengelola kelas diperbolehkan mengajar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga yang terjadi adalah mahasiswa akan merasa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pembelajaran yang membosankan. Selain itu pula kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian seorang dosen mendapat sorotan tajam dimasyarakat. Beberapa peristiwa yang pernah terjadi di Bali yaitu 1) terjadinya pelecehan yang dilakukan oleh oknum dosen kepada mahasiswinya ketika hendak melakukan bimbingan skripsi (Arri, 2020); 2) pernyataan Desak Made Darmawati yang menimbulkan kegaduhan dimasyarakat terutamanya masyarakat Bali yang

I Putu Windu Mertha Sujana, 2022

PENGEMBANGAN MODUL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ELEKTRONIK BERBASIS BUDAYA SPIRITUAL BAGI GENERASI MUDA HINDU DALAM RANGKA PEMBINAAN DHARMA AGAMA DAN DHARMA NEGARA PADA PERGURUAN TINGGI DI BALI

beragama Hindu, hal ini dikarenakan pernyataannya itu telah menyinggung keyakinan tentang Tuhan dalam agama Hindu (Suadnyana, 2021).

1.2.4 Media pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang digunakan belum menyesuaikan dengan karakteristik generasi digital native

Media pembelajaran yang digunakan oleh dosen Pendidikan Kewarganegaraan selama ini masih bersifat konvensional seperti hanya menggunakan buku cetak ataupun modul cetak. Sedangkan pembelajaran yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang tergolong generasi digital native, perlu kiranya media pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan disesuaikan dengan karakteristik mahasiswa yaitu berbasis digital. Mayoritas dosen saat ini lahir sebelum tahun 1980 yang dikategorikan *digital immigrant generation* (DIG) (Prensky, 2001). Pendidik yang tergolong DIG memiliki perbedaan dengan anak didik DNG. Anak didik DNG lahir pada budaya yang telah dipenetrasi oleh teknologi digital (Kivunja, 2014) sedangkan pendidik DIG lahir pada saat teknologi masih sangat terbatas (Prensky, 2001). DNG memiliki cara berpikir yang berbeda, kebiasaan belajar dan bahasa daripada DIG. Anak didik DNG memiliki kebiasaan belajar dengan cara yang menyenangkan dan fleksibel (seperti belajar sambil mendengarkan musik, menonton televisi, dan juga sambil mengobrol dengan teman), akan tetapi pendidik DIG berpandangan belajar dengan cara seperti itu tidak akan berhasil karena pendidik DIG tidak bisa belajar seperti itu (Prensky, 2001). Pola berpikir dan kebiasaan belajar yang berbeda, telah menunjukkan perbedaan budaya antara dua generasi dalam proses pembelajaran yang mereka alami. Menjadi pendidik profesional abad-21 tentunya tidak bisa memaksakan model pembelajaran, metode pembelajaran, serta bahan ajar yang digunakan sesuai dengan kehendak dari pendidik, akan tetapi harus disesuaikan dengan karakteristik dari anak didik mereka.

1.2.5 Bahan ajar Pendidikan Kewarganegaraan yang miskin nilai-nilai budaya spiritual masyarakat.

Bahan ajar Pendidikan Kewarganegaraan lebih mengajarkan kepada mahasiswa terkait hubungan warga negara dengan negara dengan pola sekuler. Sehingga urusan negara dengan urusan agama dianggap terpisah, hal ini

I Putu Windu Mertha Sujana, 2022

PENGEMBANGAN MODUL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ELEKTRONIK BERBASIS BUDAYA SPIRITUAL BAGI GENERASI MUDA HINDU DALAM RANGKA PEMBINAAN DHARMA AGAMA DAN DHARMA NEGARA PADA PERGURUAN TINGGI DI BALI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengindikasikan bahwa bahan ajar Pendidikan Kewarganegaraan itu miskin akan nilai yang bersumber pada *local wisdom, cultural, spiritual-relious* masyarakat. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Sukadi (2010) yang menyatakan praktek pembelajaran di Bali diwarnai oleh hal-hal berikut: (1) nilai sosial budaya beserta nilai moral sangat kurang untuk disinergikan dalam dunia pendidikan khususnya pembelajaran PKn; (2) Rencana pembelajaran dan silabus PKn (yang memuat metode, materi, media, evaluasi, dan referensi) kurang mensinergikan nilai spiritual-religius; dan (3) proses belajar mengajar di kelas terkesan hanya menekankan aktivitas fisik dan kognitif tingkat rendah serta sedikit sentuhan aktivitas mental yang bersumber moralitas, spiriitual, dan religious; (4) bahan ajar PKn lebih mengajarkan kepada peserta didik terkait hubungan warga negara dengan negara (berpola sekuler) sehingga urusan negara dengan urusan agama dianggap terpisah, hal ini menjelaskan bahwa bahan ajar PKn miskin akan nilai yang bersumber pada *local wisdom, cultural, spiritual-relious* masyarakat. (5) Inovasi pembelajaran yang telah digunakan selama proses pembelajaran PKn tidak terjamin keberlanjutannya, hal ini disebabkan oleh pendidik merasa asing dengan profesinya akibat kurang berbasis *local wisdom* masyarakat setempat.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Identifikasi masalah telah mengantarkan serta memberikan inspirasi kepada peneliti untuk melaksanakan studi etnografi pada jenjang pendidikan tinggi di Bali, dengan berupaya memberikan pedoman kepada generasi muda Hindu untuk dapat melaksanakan *dharma agama* beserta *dharma negaranya* melalui pendidikan kewarganegaraan yang telah diintegrasikan dengan nilai budaya spiritual hindu. Adapun fokus permasalahan penelitian sebagai berikut.

- 1) Bagaimana praktik Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan tinggi di Bali dalam rangka pembinaan *dharma agama* dan *dharma negara* ?
- 2) Bagaimana kaitan antara budaya spiritual Hindu masyarakat Bali dengan Pendidikan Kewarganegaraan?
- 3) Bagaimana desain bahan ajar Pendidikan Kewarganegaraan berbasis budaya spiritual Hindu bagi generasi muda Hindu dalam rangka pembinaan *dharma agama* dan *dharma negara*?

1.4 Tujuan Penelitian

Rumusan masalah tersebut telah mengantarkan peneliti kepada beberapa tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu.

- 1) Mengidentifikasi dan menganalisis praktik Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan tinggi di Bali dalam rangka pembinaan *dharma agama* dan *dharma negara*.
- 2) Mengidentifikasi dan menganalisis kaitan antara budaya spiritual Hindu masyarakat Bali dengan Pendidikan Kewarganegaraan.
- 3) Menghasilkan desain bahan ajar Pendidikan Kewarganegaraan berbasis budaya spiritual Hindu bagi generasi muda Hindu dalam rangka pembinaan *dharma agama* dan *dharma negara*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diyakini oleh peneliti diperoleh melalui penelitian ini adalah memberikan penguatan terhadap kedudukan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian yang bertujuan membentuk warga negara yang cerdas (secara spiritual, emosional dan intelektual) dan baik (memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa serta mampu mengamalkan *dharma agama* dan *dharma negaranya*). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Dari Segi Teoretis

- 1) Hasil penelitian ini, diupayakan agar mendatangkan masukan dalam pengembangan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berbasis Agama Hindu melalui pendekatan penelitian Kualitatif.
- 2) Melalui bahan ajar PKn yang menransformasikan nilai kearifan lokal (Bali) dalam proses perkuliahan PKn diupayakan mampu mengembangkan nilai karakter bangsa
- 3) Sub materi “Hak dan Kewajiban sebagai warga negara” dapat dipahami dan dikembangkan secara maksimal dalam perkuliahan PKn.

1.5.2 Dari Segi Kebijakan

- 1) Bermanfaat bagi pengambil kebijakan untuk mengetahui dan memperoleh informasi terkait dengan karakteristik masyarakat Bali.
- 2) Bermanfaat dalam memberikan data dan fakta terkait dengan kebudayaan spiritual Hindu masyarakat Bali untuk dapat digunakan sebagai analisis dalam mengambil kebijakan penyelenggaraan kegiatan perkuliahan yang dilandasi dengan budaya masyarakat.
- 3) Bermanfaat dalam menciptakan solusi bagi pengambil kebijakan dalam upaya menjadikan generasi muda Hindu memiliki kesadaran terhadap kewajiban yang diembannya.

1.5.3 Dari Segi Praktik

Selain memberikan manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak sebagai berikut:

- 1) Secara praktis temuan bahan ajar PKn berbasis budaya spiritual Hindu dalam mata kuliah PKn dapat dijadikan bahan kuliah nantinya.
- 2) Bahan ajar PKn berbasis budaya spiritual Hindu dalam mata kuliah PKn diupayakan mningkatkan kreativitas dosen ketika mengembangkan materi perkuliahan di kelas.
- 3) Bahan ajar PKn berbasis budaya spiritual Hindu dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan bahan ajar untuk mata kuliah PKn pada daerah lain dengan berbasis nilai budaya spiritual etnik lain di jenjang pendidikan tinggi yang berada di berbagai daerah.
- 4) Bahan ajar PKn berbasis budaya spiritual Hindu dalam mata kuliah PKn berbasis *local wisdom* Bali dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa untuk hidup rukun dan saling menghargai terhadap perbedaan yang terjadi.
- 5) Bahan ajar PKn berbasis budaya spiritual Hindu dalam mata kuliah PKn dapat membantu mahasiswa untuk belajar secara mandiri, dan materi yang disajikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mahasiswa dalam rangka pengembangan karakter toleransi.

1.5.4 Dari Segi Isu serta Aksi Sosial

- 1) Membantu mahasiswa yang tergolong generasi digital native untuk memahami dan menyadari serta memiliki kesadaran di dalam mengamalkan *dharma agama* dan *dharma negaranya*.
- 2) Memberikan arahan serta informasi kepada mahasiswa yang tergolong generasi digital native bahwa walaupun ia menguasai penggunaan teknologi tetapi mereka tidak boleh melupakan nilai-nilai budaya spiritual dari daerahnya masing-masing.

1.6 Struktur Organisasi Disertasi

Penyusunan disertasi ini telah disesuaikan dengan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia yang diterbitkan tahun 2018, dimana secara umum disertasi ini terdiri dari lima Bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, pada bab ini peneliti mendeskripsikan latar belakang penelitian ini penting untuk diteliti. Uraian latar belakang itu selanjutnya diidentifikasi permasalahan yang terjadi dengan menyusunnya dalam bentuk rumusan masalah. Langkah berikutnya peneliti mencoba menyusun tujuan yang diharapkan tercapai serta mencoba untuk mendeskripsikan manfaat secara teoritis dan secara praktis yang sekiranya didapatkan nantinya. Bab pendahuluan ini diakhiri dengan penyusunan sistematika penulisan yang menggambarkan urutan rangkaian penyusunan disertasi.

Peneliti selanjutnya menyusun bab kedua yaitu bab yang mendeskripsikan kajian pustaka dan landasan teori yang digunakan peneliti. Bagian ini peneliti mendeskripsikan beberapa sumber pustaka yang relevan yang digunakan sebagai basis dalam pengembangan kerangka berpikir penelitian ini. Kajian pustaka ini disesuaikan dengan pokok-pokok pikiran yang dikembangkan dalam penelitian ini. *Grand teory* yang digunakan peneliti berkenaan dengan kewajiban warga negara, yang terdiri dari: 1) Teori Deontologi menurut Immanuel Kant; 2) kewajiban terhadap Agama (*dharma agama*) dan; 3) Kewajiban terhadap negara (*dharma negara*).

Middle teory yang digunakan peneliti terkait dengan teori dan konsep Pendidikan Kewarganegaraan berbasis budaya spiritual Hindu. Penelitian ini mengangkat nilai budaya spiritual Hindu yang disinergikan dengan substansi materi

Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan tinggi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Beberapa teori dimanfaatkan peneliti sebagai “kompas” untuk memandu peneliti dalam melaksanakan penelitian, dan diharapkan dapat memberikan penjelasan konseptual teoritik sebagai dasar untuk “membaca” dan menjawab fenomena empirik secara tepat dan rasional. Melalui hasil petualangan secara teoritik dan empirik yang dilaksanakan peneliti, dipandang jika teori konstruktivisme, teori kewarganegaraan neorepublikan, teori *receptio a contrario*, konsep *civic engagement*, konsep Empat Konsesus bernegara yang wajib dimiliki oleh *umat Hindu*, konsep peranan agama hindu dalam pembangunan bidang pendidikan, konsep pendidikan kewarganegaraan dalam konteks ideologi dan sistem pendidikan nasional, dan konsep nilai spiritual hindu sebagai landasan memperkuat karakter bangsa relevan digunakan sebagai alat bantu analisis guna melihat dan menjelaskan pendidikan kewarganegaraan yang berbasis budaya spiritual Hindu bagi generasi muda Hindu dalam menjalankan *dharma agama* dan *dharma negaranya*.

Applied teory digunakan dalam melandasi bahan ajar Pendidikan Kewarganegaraan berbasis budaya spiritual Hindu bagi generasi muda Hindu dalam menjalankan *dharma agama* dan *dharma negara*. Kajian pustaka ini sangat bermanfaat sebagai bahan yang mendasari penulis memilih menggunakan bahan ajar berupa modul digital. Kajian pustaka itu terdiri dari konsep bahan ajar Pendidikan Kewarganegaraan, konsep pendidikan multikultur, dan konsep karakteristik warga negara muda yang tergolong digital native. Peneliti juga menggunakan filosofi yang mendasari Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Budaya Spiritual Hindu. Kajian pustaka itu terdiri dari filsafat rekonstruksionisme, konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara, dan konsep pengetahuan dalam perspektif budaya spiritual Hindu.

Bab berikutnya yang tidak kalah penting yaitu bab terkait dengan metodologi yang digunakan peneliti. Pertama kali bab ini mendeskripsikan terkait dengan lokasi penelitian yang dipilih yaitu mengambil lokasi pada jenjang pendidikan tinggi di Provinsi Bali diantaranya Universitas Pendidikan Ganesha dan Universitas Dwijendra. Berikutnya diuraikan tentang subjek yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berasal dari kalangan praktisi agama Hindu, praktisi budaya

Bali, praktisi Pendidikan Kewarganegaraan, pimpinan Universitas Pendidikan Ganesha dan Universitas Dwijendra, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan mahasiswa yang sedang ataupun telah mengambil mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Selanjutnya peneliti mendeskripsikan desain penelitian yang digunakan yaitu penelitian ini menggunakan desain kualitatif metode etnografi. Penggunaan desain kualitatif bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada peneliti dalam mengkaji dan menganalisis berbagai kejadian atau fenomena yang peneliti temukan di lapangan secara komprehensif.

Deskripsi berikutnya adalah terkait dengan teknik pengumpulan data. Prinsip yang digunakan oleh peneliti ketika hendak melakukan pengumpulan data yaitu prinsip *human instrument*. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan seperti teknik wawancara, teknik observasi, teknik studi dokumen, dan dibantu dengan instrumen observasi buatan peneliti sendiri. Data yang telah dikumpulkan peneliti melalui beberapa teknik pengumpulan data, selanjutnya dilakukan uji keabsahan terhadap data tersebut. Empat kriteria uji keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu Uji Kredibilitas, Uji Transferabilitas, Uji *Dependability*, dan Uji Konfirmabilitas. Langkah terakhir di bab ke-3 ini adalah mendeskripsikan teknik analisis data yang digunakan peneliti. Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti yaitu metode interaktif dengan alur reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

Disertasi ini juga terdiri dari bab ke-4 yang mendeskripsikan terkait dengan temuan dan pembahasan dari hasil penelitian yang didapatkan. Pada bab IV di sajikan secara lengkap paparan temuan dan pembahasan penelitian Pendidikan Kewarganegaraan berbasis budaya spiritual Hindu bagi generasi muda Hindu dalam menjalankan *dharma agama* dan *dharma negara*. Pemaparan temuan penelitian beserta pembahasannya mengikuti pola *nontematik*. Penelitian ini dilaksanakan pada pendidikan tinggi di Bali yaitu Universitas Pendidikan Ganesha dan Universitas Dwijendra. Temuan yang diharapkan adalah berupa data-data yang dapat menjelaskan tentang praktik pendidikan kewarganegaraan pada jenjang pendidikan tinggi di Bali sebagai pembinaan *dharma agama* dan *dharma negara*, data-data tentang kaitan antara budaya spiritual hindu masyarakat Bali dengan pendidikan kewarganegaraan, dan data-data yang bermanfaat dalam

penyusunan desain bahan ajar pendidikan kewarganegaraan berbasis budaya spiritual Hindu bagi generasi muda Hindu dalam menjalankan *dharma agama* dan *dharma negaranya*. Temuan penelitian yang telah di deskripsikan dan dikelompokkan selanjutnya dilakukan proses pembahasan serta pembuktian terhadap teori pada bab ke-2, sehingga diharapkan menghasilkan *novelty* penelitian yang secara khusus dapat melengkapi hasil penelitian terdahulu mengenai pendidikan kewarganegaraan yang berbasis budaya spiritual Hindu bagi generasi muda Hindu dalam menjalankan *dharma agama* dan *dharma negara*.

Bab terakhir dari penyusunan disertasi ini adalah bab yang mendeskripsikan simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Bab terakhir ini akan dikemukakan terkait dengan simpulan dari disertasi yang berjudul “Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Budaya Spiritual Hindu Bagi Generasi Muda Hindu Dalam Rangka Pembinaan *Dharma Agama* dan *Dharma Negara* (studi etnografi pada pendidikan tinggi di Bali)”. Penelitian ini juga akan mendeskripsikan implikasi dan rekomendasi yang di temukan dalam penelitian ini.